

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

Penelitian mengenai penyusunan agenda kebijakan di LP2B ini dilakukan di Kota Batu, maka dalam bab ini akan dijelaskan mengenai deksripsi wilayah Kota Batu, serta deksripsi dari instansi-instansi terkait yang menangani kebijakan LP2B di Kota Batu yaitu Dinas Pertanian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Batu. *Pertama* peneliti akan menjelaskan mengenai gambaran umum Kota Batu seperti kondisis geografis, administartif, gambaran potensi pertanian, serta permukiman di Kota Batu. *Kedua* peneliti akan menjelaskan mengenai profil dari bappeda, Dinas Pertanian dan Dinas PU yang didalamnya termuat struktur organisasi, serta visi misi instansi.

A. Gambaran Umum Kota Batu

Kota Batu atau Kota Wisata Batu (KWB) merupakan salah satu kota yang baru terbentuk pada tahun 2001 sebagai hasil dari pemekaran dari Kabupaten Malang melalui UU No 11 tahun 2001 tertanggal 21 juni 2001. Lebih lanjut mengenai gambaran Kota Batu serta instansi terkait dalam kebijakan perlindungan LP2B akan dijelaskan dalam bab ini.

1. Kondisi Geografis dan Topografis Kota Batu

Kota Batu merupakan salah satu kota yang terletak di wilayah administratif Jawa Timur, secara keseluruhan Kota Batu memiliki luas kawasan sebesar 19.908,72 ha atau sekitar 0,42 % dari total luas wilayah Jawa Timur. Topografi Kota Batu tersusun dari perbukitan dengan komposisi 4 jenis tanah, yaitu jenis tanah *andosol* (lahan tanah paling subur), jenis tanah *kambisol* (lahan

tanah yang dikategorikan cukup subur), jenis tanah *alluvial* (jenis tanah yang kurang subur dan mengandung kapur), dan jenis tanah *latosol*.

Terdapat tiga gunung yang berada di wilayah Kota Batu yaitu Gunung Panderman (2.010 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), dan Gunung Arjuno (3.339 meter). Kondisi hidrologi Kota Batu banyak dipengaruhi oleh sungai yang mengalir di pusat Kota yaitu Sungai Brantas dan air tanah yang cukup melimpah, serta sebagian besar wilayah Kota Batu berupa perbukitan. Kondisi topografi tersebut yang mendukung Kota Batu sebagai daerah yang cocok digunakan untuk pertanian.

Secara astronomi Kota Batu terletak diantara 122°17' sampai 122° 57' Bujur Timur dan 7°44' sampai dengan 8°26' Lintang Selatan. Kota Batu berbatasan secara langsung dengan beberapa Kota/Kabupaten lainnya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Malang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malang

2. Administrasi Kota Batu

Secara administratif Kota Batu terbagi dalam 3 kecamatan, yakni Kecamatan Bumiaji, Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo. Dari 3 kecamatan tersebut terbagi lagi atas 19 desa, 5 kelurahan, 238 RW dan 1.127 RT, 5 pemerintahan desa dan 19 pemerintah kelurahan. Kecamatan Bumiaji merupakan

kecamatan yang memiliki luas wilayah paling luas dibanding kecamatan lainnya di Kota Batu, sehingga tidak mengherankan jika Kecamatan Bumiaji memiliki jumlah pemerintahan desa paling banyak mencapai 9 pemerintahan. Kecamatan Batu terdiri dari 4 desa dan 4 kelurahan, sedangkan Kecamatan Junrejo terdiri dari 1 kelurahan dan 6 desa.

Wilayah Kota Batu berdasarkan aspek administratif dan fungsional mencakup seluruh wilayah daratan seluas 19.908,7 Ha beserta ruang udara di atasnya dan ruang didalam bumi. Wilayah-wilayah tersebut kemudian ditetapkan dalam pembagian wilayah kota beserta penetapan fungsi wilayah yang disebut Bagian Wilayah Kota (BWK). Terdapat 3 BWK di Kota Batu yang ditetapkan dalam 3 Kecamatan⁶², yakni Kecamatan Bumiaji, Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo. Secara lebih lengkap pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK) tersebut ialah sebagai berikut.

1) Bagian Wilayah Kota (BWK) I

- a. BWK I memiliki cakupan wilayah meliputi Kecamatan Batu dengan pusat pelayanan berada di Desa Pesanggrahan.
- b. BWK I sebagai wilayah utama pengembangan pusat pemerintahan kota, pengembangan kawasan kegiatan perdagangan dan jasa modern, kawasan pengembangan kegiatan pariwisata dan jasa penunjang akomodasi wisata serta kawasan pendidikan menengah.
- c. Pusat pelayanan pemerintahan kota ditetapkan pada BWK I.

⁶² Perda RTRW Kota Batu No 7 Tahun 2011

2) Bagian Wilayah Kota (BWK) II

- a. BWK II memiliki cakupan wilayah meliputi Kecamatan Junrejo dengan pusat pelayanan di Desa Junrejo.
- b. BWK II sebagai wilayah utama pengembangan permukiman kota dan dilengkapi dengan pusat pelayanan kesehatan skala kota dan regional, kawasan pendidikan tinggi dan kawasan pendukung perkantoran pemerintahan dan swasta.
- c. Sub Pusat pelayanan Kota di BWK II terdapat di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo, memiliki fungsi sebagai: subpusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan dan atau pendukung pemerintahan kota, pusat pelayanan pendidikan tinggi, dan sebagai pusat perdagangan kecamatan.

3) Bagian Wilayah Kota (BWK) III

- a. BWK III dengan cakupan wilayah meliputi Kecamatan Bumiaji dengan pusat pelayanan di Desa Punten.
- b. BWK III sebagai wilayah utama pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan kawasan wisata alam dan lingkungan serta kegiatan agrowisata.
- c. Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK III terdapat di Desa Punten memiliki fungsi sebagai sub pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan, pusat kegiatan agribisnis, pelayanan pendidikan menengah.

3. Demografi Kota Batu

Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Batu per desa dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Pertumbuhan Penduduk Kota Batu

No	Kelurahan/Desa	Pertumbuhan Penduduk (Jiwa)		
		2013	2014	2015
Kec. Batu				
1	Kelurahan Ngaglik	11249	11266	11303
2	Kelurahan Sisir	18561	18336	18261
3	Kelurahan Songgokerto	6903	7007	7082
4	Kelurahan Temas	17443	18103	18261
5	Desa Oro-Oro Ombo	9717	10094	10334
6	Desa Pesanggrahan	12402	12618	12769
7	Desa Sidomulyo	7674	7674	7691
8	Desa Sumberejo	7131	7131	7263
Kec. Junrejo				
9	Kelurahan Dadaprejo	5941	6145	6279
10	Desa Beji	7736	7856	7943
11	Desa Junrejo	9069	9256	9382
12	Desa Mojorejo	4789	4921	5010
13	Desa Pendem	10947	11043	11125
14	Desa Tlekung	4050	4080	4107
15	Desa Torongrejo	5578	5621	5659
Kec. Bumiaji				
16	Desa Bulukerto	5924	5900	5904
17	Desa Bumiaji	6354	6335	6343
18	Desa Giripurno	9739	9821	9893
19	Desa Gunungsari	6714	6747	6783
20	Desa Pandanrejo	5631	5703	5757
21	Desa Punten	5201	5222	5247
22	Desa Sumbergondo	3826	3847	3868
23	Desa Tulungrejo	9145	9280	9380
24	Desa Sumber Brantas	4463	4529	4578
Total		196.951	198.608	214969

Sumber: data sekunder, dioalah

Pada tahun 2015 jumlah penduduk Kota Batu mencapai 214969 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 1.080 jiwa per km². Pertumbuhan penduduk Kota Batu pada tahun 2015 sebesar 1,09%. Diantara ketiga kecamatan yang ada di Kota Batu, Kecamatan Batu merupakan kecamatan yang memiliki penduduk paling banyak diantara kecamatan lainnya, hal ini menyebabkan kepadatan

penduduk di Kecamatan Batu mencapai 20193 jiwa per km². Meskipun luas wilayah Kecamatan Batu tidak lebih luas dari Kecamatan Bumiaji, akan tetapi jumlah penduduk Kecamatan Batu lebih banyak jika dibandingkan dengan kecamatan Bumiaji, hal ini dikarenakan Kecamatan Bumiaji menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perekonomian. Sedangkan, Kecamatan Bumiaji lebih dikembangkan pada sektor pertanian.

Menjadi daerah otonom baru, tidak mengherankan jika jumlah penduduk di Kota Batu terus mengalami pertambahan, hal ini terjadi di setiap kecamatan di Kota Batu. Faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk antara lain jumlah kelahiran, kematian, dan mutasi penduduk yang terdiri dari penduduk datang dan penduduk pindah. Kecamatan Bumiaji mengalami pertumbuhan penduduk paling besar dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya. Meskipun kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi adalah kecamatan Batu. Hingga tahun 2014 kepadatan penduduk di Kecamatan batu mencapai 202.012 jiwa per km. Kepadatan yang cukup tinggi di kecamatan Batu tidak lain dikarenakan kecamatan Batu merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan perekonomian. Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah adalah kecamatan Bumiaji, dengan prosentase luas daerah paling luas dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya dan jumlah penduduk yang tidak begitu besar menjadikan Kecamatan Bumiaji seluas 475 jiwa per km².

4. Pendidikan Di Kota Batu

Menjadi kota termuda di Jawa Timur tidak menjadikan Kota Batu lupa untuk memperhatikan pendidikan bagi warganya. Meskipun tidak terdapat jenjang pendidikan tinggi, jumlah sarana dan prasana pendidikan dasar hingga menengah di Kota Batu terbilang lengkap.

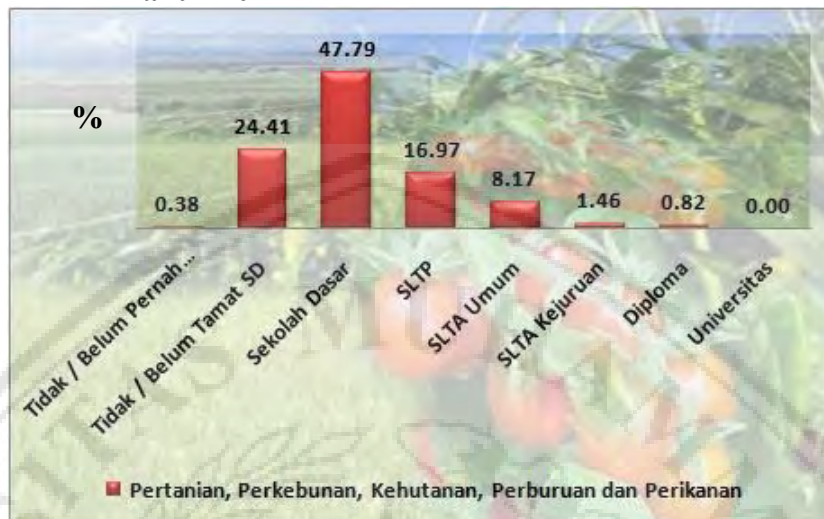
Tabel 3.1 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Di Kota Batu Tahun 2012 – 2014

Uraian	2013	2014	2015	Peningkatan 2013-2015 (%)
SD/MI	89	88	88	
Murid	18.868	16.752	19038	1,009
Guru	1.109	1.230	1198	1,08
SLTP/MTs	31	30	30	
Murid	9.633	7.192	10003	1,03
Guru	773	860	761	0.98
SLTA/MAN	27	26	26	
Murid	7.451	7.044	9044	1.21
Guru	803	968	1016	1.26

Sumber: Statistik Daerah Kota Batu 2015, Hlm 11, diolah

Kota Batu tidak hanya berfokus pada pembangunan dan pengembangan wisata, pemerintah juga memberikan perhatiannya pada sektor pendidikan di Kota Batu, hal ini dibuktikan dengan dimilikinya sekolah tingkat dasar hingga menengah atas yang memadai, jumlah guru dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik terutama di jenjang sekolah menengah atas (SMA). Pertambahan jumlah guru diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Batu.

Grafik 3.1 Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Bidang Pertanian Tahun 2014



Sumber: Ringkasan Eksekutif Ketenagakerjaan Kota Batu 2015

Sebesar 27 % dari angkatan tenaga kerja di Kota Batu bekerja pada sektor pertanian. Jika dilihat dari grafik 3.1 terlihat bahwa sebagian besar penduduk yang bekerja di sektor pertanian adalah penduduk yang berpendidikan hanya sampai sekolah dasar, dengan tingkat pendidikan yang minim (hanya sampai sampai sekolah dasar) maka pengetahuan petani akan penggunaan pestisida dan bahan kimia juga minim, sehingga penggunaan pestisida sering tidak terukur dan asal-asalan. Hal ini yang kemudian menyebabkan lahan pertanian menjadi rusak dan menyebabkan produksi menjadi menurun. Selain itu, hal tersebut menjadikan petani mudah tergiur terhadap tawaran untuk menjual lahan pertaniannya, dan tidak berpikir panjang serta dampak dari penjualan lahan pertanian tersebut.

5. Pertanian di Kota Batu

Kota Batu memiliki jenis tanah yang beragam dan memiliki tingkat kesuburan yang berbeda-beda. Lahan di Kota Batu berupa tanah mekanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi, sifat tanah

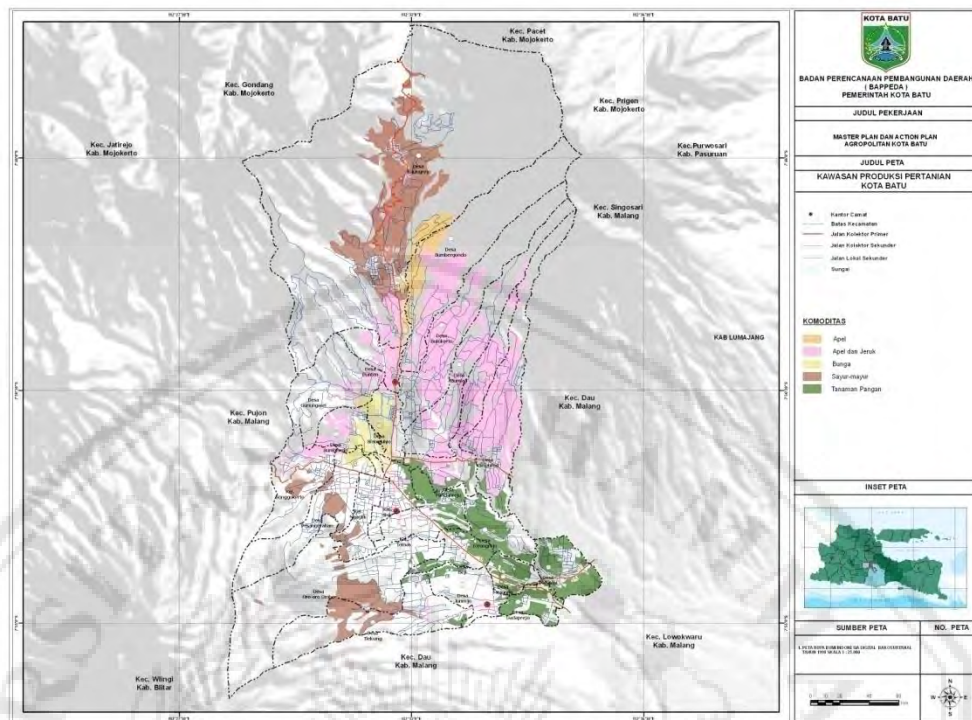
semacam ini mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi. Komoditi yang terkenal dari Kota Batu adalah produk-produk pertanian hortikultura buah-buahan, sayur-sayuran dan tanaman hias serta hasil peternakan berupa susu segar.

Tabel 3.2 Luas Kecamatan Menurut Jenis Tanah

No.	Kecamatan	Jenis Tanah (ha)			
		Andosol	Kambisol	Alluvial	Latosol
1	Batu	1.831,04	889,31	239,86	260,34
2	Junrejo	1.526,19	741,25	199,93	217,00
3	Bumiaji	2.873,89	1.395,81	376,48	408,61
Total		6.231,12	3.026,37	816,27	885,95

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Batu Dalam Angka 2013, Hlm.4

Kecamatan Bumiaji merupakan kecamatan yang memiliki luas kawasan terluas dibandingkan dengan kecamatan lainnya, total kawasan Kecamatan Bumiaji mencapai 64% dari keseluruhan luas wilayah Kota Batu dan didominasi oleh lahan pertanian. Sehingga tidak mengherankan jika jenis tanah andosol yang memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Kecamatan Batu juga memiliki lahan dengan jenis tanah Andosol yang cukup luas, akan tetapi dewasa ini Kecamatan Batu lebih diutamakan untuk kawasan perkantoran dan destinasi pariwisata. Sedangkan Kecamatan Bumiaji memiliki total kawasan 13% dari total kawasan Kota Batu, dan didominasi oleh jenis tanah andosol, sehingga menjadikan kecamatan Junrejo diarahkan untuk menjadi kawasan pertanian layaknya kecamatan Bumiaji.



Gambar 3.1 Penggunaan Lahan untuk Pertanian di Kota Batu

Sumber: Bappeda

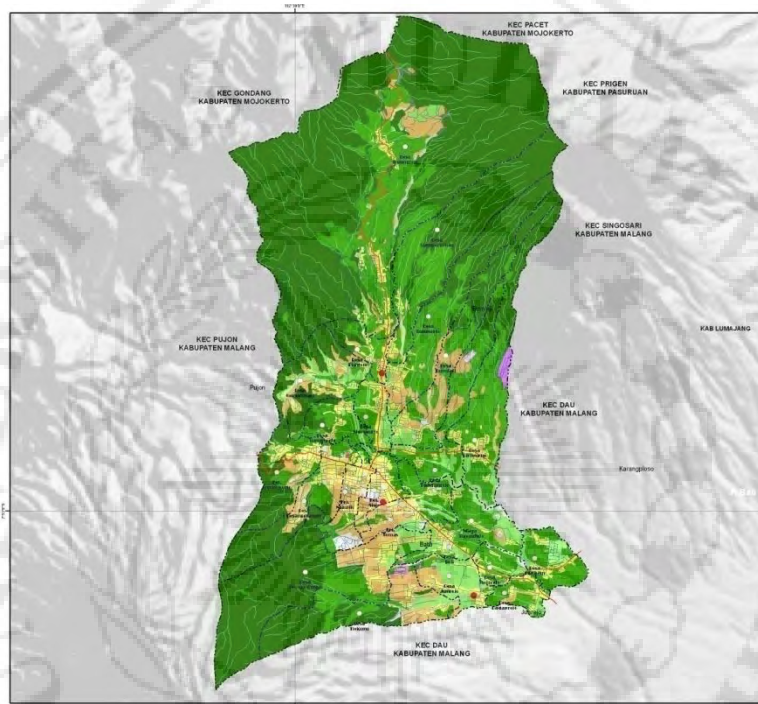
Dalam peta tersebut digambarkan kawasan-kawasan pertanian di Kota Batu dengan hasil komoditas tanaman berupa apel, jeruk, bunga, sayur-mayur dan tanaman pangan. Untuk komoditas apel diwakili dengan warna coklat⁶³, sedangkan gabungan antara buah apel dan jeruk diwakili dengan warna merah muda. Kuning mewakili lahan yang ditanami bunga yang pada triwulan ke IV tahun 2015 seluas 138,13 ha, merah kecoklatan mewakili lahan yang ditanami sayur mayur per Desember 2015 seluas 292,74 ha, dan tanaman pangan (padi) diwakili oleh warna hijau pada tahun 2015 seluas 2480 ha. Jika dilihat dari peta tersebut, terlihat lahan pertanian di Kota Batu digunakan untuk menanam bunga

⁶³ Perhitungan produksi buah-buahan di Kota Batu di dasarkan pada pohon yang masih menghasilkan buah, bukan berdasarkan luas lahan yang ditanami

yang lebih berfokus di wilayah Kecamatan Bumiaji. Sedangkan untuk tanaman pangan berada di Kecamatan Junrejo.

6. Perumahan dan Pemukiman

Persebaran pemukiman di Kota Batu lebih terfokus pada beberapa daerah seperti yang ditampilkan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 3.2 Penggunaan Lahan Kota Batu
Sumber: Bappeda

Dari peta tersebut dapat dikatakan bahwa perumahan lebih banyak berada di Kecamatan Batu. Sedangkan kecamatan Bumiaji mayoritas kawasan masih berupa hutan lindung, begitu juga dengan Kecamatan Junrejo yang masih banyak kawasan pertaniannya. Dalam kurun waktu 2013 sampai 2015 lahan untuk permukiman di Kota Batu bertambah sebanyak 39.79 ha, dari 1592.39 ha menjadi 1632.15 ha atau bertambah sebanyak 1.02%.⁶⁴

BWK I yang merupakan Kecamatan Batu difungsikan sebagai pusat perdagangan dan perkantoran, karena mayoritas masyarakat Kota Batu bertempat

⁶⁴ Kota Batu Dalam Angka 2016, Hlm. 161

tinggal di Kecamatan Batu, sehingga tidak mengherankan jika di Kecamatan Batu memiliki bangunan rumah dan lahan yang digunakan sebagai pemukiman lebih banyak dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya. Jumlah penduduk yang terus bertambah juga mempengaruhi kebutuhan akan lahan untuk pemukiman, hal inilah yang kemudian menyebabkan maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Karena kebutuhan lahan untuk pemukiman cenderung terus bertambah karena adanya pertambahan jumlah penduduk, dan perkembangan Kota Batu.

7. Pariwisata

Letak Kota Batu yang berada di lereng Gunung Panderman dan Arjuna membuat daerah ini merupakan tempat tujuan wisata. Pada awalnya wisata di Kota batu hanya wisata Selecta, namun seiring berjalannya waktu tempat wisata di Kota Batu semakin bertambah baik wisata alam maupun wisata buatan, terlebih semenjak dicanangkannya Kota Batu sebagai Kota Wisata pada tahun 2010, maka pembangunan di bidang pariwisata semakin digalakkan.

Dari beberapa tempat wisata di Kota Batu Kusuma Agro dan Selecta mengalami kenaikan jumlah pengunjung dibandingkan tahun 2014. Sebaliknya objek wisata Cangar, Jatim Park serta BNS mengalami penurunan jumlah pengunjung pada tahun 2015. Sebagai tempat wisata yang berbasis pertanian, Kusuma Agro memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan, karena masih mempertahankan keasliannya. Kenaikan jumlah pengunjung Selecta dan Kusuma Agro masing-masing sebesar 12,2 persen dan 72,7 persen dibandingkan tahun 2014. Adanya tempat wisata baru membuat banyak alternatif bagi para wisatawan

yang berkunjung ke Batu, sehingga ada beberapa tempat wisata yang sedikit mengalami penurunan jumlah pengunjung. Museum Angkut yang mulai beroperasi di awal tahun menjadi primadona dibandingkan tempat wisata yang lain.

Sebagai Kota tujuan wisata, kegiatan ekonomi di Kota Batu yang menunjang kepariwisataan salah satunya adalah jasa akomodasi. Jumlah hotel dan jasa akomodasi lainnya di Kota Batu pada tahun 2013 adalah 477 perusahaan, naik menjadi 500 pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 menjadi 550 perusahaan. Dari 550 jasa akomodasi yang ada di Kota Batu 12 merupakan hotel berbintang, Kota Batu merupakan daerah tingkat II yang jumlah hotel berbintangnya cukup banyak setelah Kota Surabaya dan Kota Malang. Seiring meningkatnya jumlah hotel dan jasa akomodasi jumlah kamar dan tempat tidur yang tersedia juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 tersedia 5.484 kamar dengan 10.188 tempat tidur meningkat menjadi 6.066 kamar dengan 11.292 tempat tidur pada tahun 2015.⁶⁵

Perkembangan pariwisata serta bertambahnya jumlah akomodasi pariwisata menyebabkan maraknya lahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Seperti *Batu Night Spectacular* yang dibangun di lahan pertanian seluas 4,5 ha, *Batu Town Square* seluas 10.000 m², *Predator Fun Park* seluas 2,7 ha. Dengan demikian lahan pertanian yang dialihfungsikan untuk pembangunan wisata kurang lebih sekitar 13,2 ha.⁶⁶

⁶⁵ Statistik daerah kota Batu 2016, Hlm.22-23

⁶⁶ Hasil ini merupakan hasil dari rangkuman beberapa wawancara. Belum ada data pasti lahan pertanian yang dialih fungsikan menjadi lahan non pertanian. Data ini dapat berubah sesuai dengan pembangunan pariwisata lainnya yang akan dibangun di lahan pertanian.

B. Profil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu (BAPPEDA) merupakan salah satu lembaga daerah dari Pemerintah Kota Batu, dalam menetapkan visi wajib memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik. Maka dari itu Visi BAPPEDA Kota Batu berdasarkan Renstra BAPPEDA Tahun 2012-2017 adalah:

“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terpadu, Partisipatif, dan Berkualitas, serta Berkelanjutan dalam Mendukung Pencapaian Kota Batu sebagai Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisata Internasional”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Bappeda kemudian menyusun misi yang merupakan penjabaran dari visi Bappeda yaitu:

1. Menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan partisipatif; perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, haruslah senantiasa menjaga koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan daerah dalam upaya menentukan arah pembangunan yang dapat diimplementasikan oleh SKPD teknis. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah juga bersifat partisipatif, harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus

bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak.

2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan; implementasi perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, harus mengacu pada prinsip efektif, efisien, dan tepat waktu, hal ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan melalui upaya pengendalian perencanaan pembangunan daerah, dengan kegiatan monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan, diharapkan dapat mengetahui apakah proses pembangunan yang terlaksana sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, dan hasilnya dapat dievaluasi sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan berikutnya.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan data/informasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang baik, dibutuhkan ketersediaan data dan informasi yang memadai, dengan memastikan data tersebut akurat/valid, aktual/update, terukur, dan dapat diakses. Ketersediaan data dan informasi yang berkualitas akan meningkatkan kualitas pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya kualitas pengelolaan data dan informasi sangat mempengaruhi proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

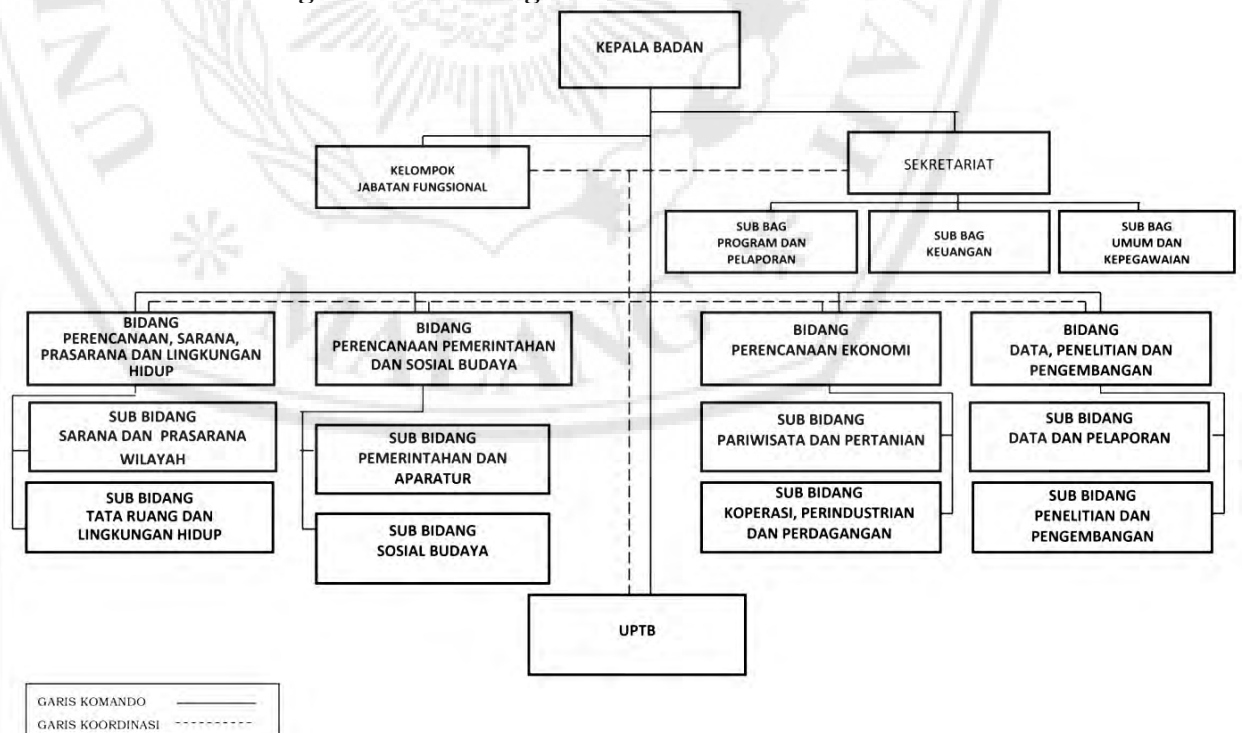
1. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kota Batu

BAPPEDA Kota Batu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, dengan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

sedangkan tugas masing-masing bidang akan dijelaskan melalui bagan struktur Bappeda berikut ini.

Gambar 3.3 Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Batu



Sumber: Peraturan Walikota Batu Nomor 31 Tahun 2013

Struktur organisasi dalam Bappeda berdasarkan tugasnya adalah sebagai berikut, Kepala Badan mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi program dan kegiatan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pembangunan, dan statistik.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Badan, urusan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Badan, dan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Badan. Bidang Perencanaan Sarana, Prasarana, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan, menyusun pedoman, membina, mengkaji, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah dan lingkungan hidup.

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas merumuskan, menyusun pedoman, membina, mengkaji, mengendalikan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, aparatur, dan sosial budaya. Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas merumuskan, menyusun pedoman, membina, mengkaji, mengendalikan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi. Bidang Data, Penelitian, dan Pengembangan mempunyai tugas merumuskan, menyusun pedoman, mengkaji, memfasilitasi, mengendalikan, dan mengevaluasi data perencanaan dan informasi hasil pembangunan, serta penelitian dan pengembangan pembangunan.

Visi kedua dari Bappeda adalah melakukan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, salah satunya dapat dilakukan dengan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan LP2B. Lebih lanjut dalam kaitannya dengan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Bappeda berperan dalam merencanakan lokasi lahan pertanian yang akan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui penyusunan Rencana Tata Ruang Kota (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan menyusunnya ke dalam peraturan daerah Kota Batu tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Bidang yang secara langsung menangani kebijakan ini adalah Bidang Perencanaan Sarana, Prasarana, dan Lingkungan Hidup.

Sedangkan Tugas dan fungsi dari Bappeda Kota Batu adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

C. Profil Dinas Pertanian Kota Batu

Dinas pertanian Kota Batu yang merupakan salah satu SKPD di Kota Batu yang pada saat penelitian ini dilaksanakan berlokasi di Jl H. Sutan Hasan Salim. Visi dari Dinas Pertanian sendiri tidak terlepas dari salah satu visi kota Batu yaitu “Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisata Internasional”. Untuk itu maka Dinas Pertanian menetapkan visi dan misinya guna mendukung visi dari walikota Batu terpilih tersebut, yaitu “***Sistem Pertanian Organik Berkelanjutan Didukung Hutan yang Lestari***”. Sedangkan Misi Dinas Pertanian Kota Batu yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan dari visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan pertanian organik dan perdagangan hasil pertanian organik.
2. Meningkatkan SDM Pertanian Kota Batu.
3. Meningkatkan agribisnis dan agroindustri berbasis pertanian domestik pedesaan.
4. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian.
5. Meningkatkan promosi dan daya saing produk pertanian lokal.
6. Menyelenggarakan dan menggerakkan pengembangan perbibitan/perbenihan, pakan, budidaya, kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen dalam mencapai penyediaan dan keamanan pangan hewani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternak dan pembudidaya ikan.
7. Mempertahankan eksistensi dan fungsi kawasan hutan.

8. Meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Pengusahaan Hutan (PH), serta Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA).

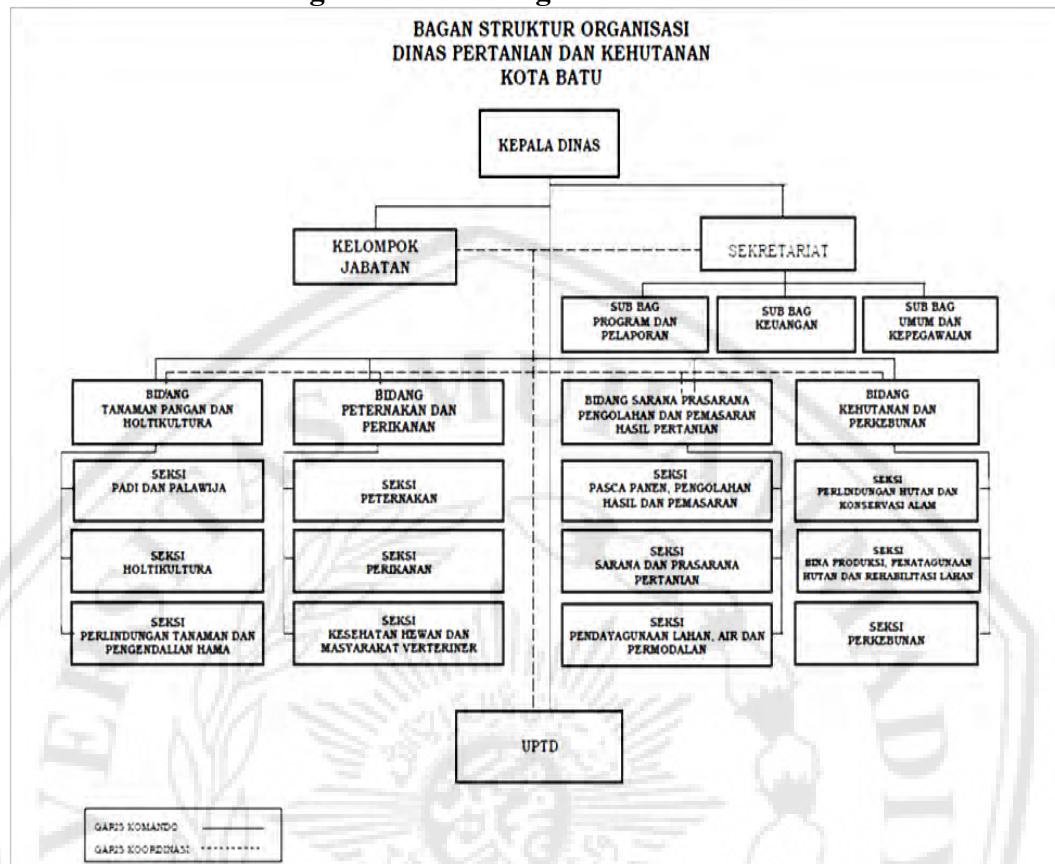
Dinas Pertanian memiliki tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. Secara umum tugas dan fungsi tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
2. Penyelenggaraan urusan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

1. Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian

Sedangkan tugas dan fungsi setiap bidang akan dijelaskan melalui struktur organisasi berikut ini.

Gambar 3.4 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Batu



Sumber: Renstra Dinas Pertanian 2012-2017

Struktur organisasi dinas pertanian dan kehutanan beserta tugas dan fungsinya sebagai berikut, Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi di bidang pertanian dan kehutanan. Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana strategis dan rencana kerja Dinas, menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, melaksanakan pembinaan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Dinas.

Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan bidang pengembangan tanaman pangan, pengembangan holtikultura dan bimbingan usaha serta pengelolaan hasil. Bidang

Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan serta mengevaluasi program dan kegiatan di bidang peternakan dan perikanan. Bidang sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil pertanian bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan serta mengevaluasi program dan kegiatan di Bidang Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Bidang Kehutanan dan Perkebunan Bidang Kehutanan dan Perkebunan bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan serta mengevaluasi program dan kegiatan di bidang perencanaan dan penatagunaan hutan dan perkebunan.

Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Bidang Kehutanan dan Perkebunan merupakan bidang yang bersentuhan langsung dengan kebijakan LP2B. Sesuai dengan visi ke 8, kebijakan LP2B juga merupakan salah satu kebijakan yang dapat menjadi strategi dalam penyelenggaraan rehabilitasi lahan (khususnya lahan pertanian). Sebagai salah satu dinas teknis yang terkait dalam perencanaan LP2B, Dinas Pertanian merupakan dinas yang berkaitan langsung baik dengan petani dan juga lahan pertanian, Dinas Pertanian adalah instansi yang memiliki data secara rinci tentang luas lahan pertanian, oleh sebab itu dalam perencanaan LP2B diperlukan peran dari Dinas Pertanian.

D. Profil Dinas Pekerjaan Umum, Pengairan dan Bina Marga

Periode tahun 2012 - 2017, Visi pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Bina Marga Kota Batu adalah “Mewujudkan Tata Kelola Infrastruktur Kebinamargaan dan Pemanfaatan Pengairan serta Pemberdayaan Sumber Daya Energi yang Berdaya Guna dan Berhasil Guna untuk Kesejahteraan dan Kemajuan Masyarakat Kota Batu”.

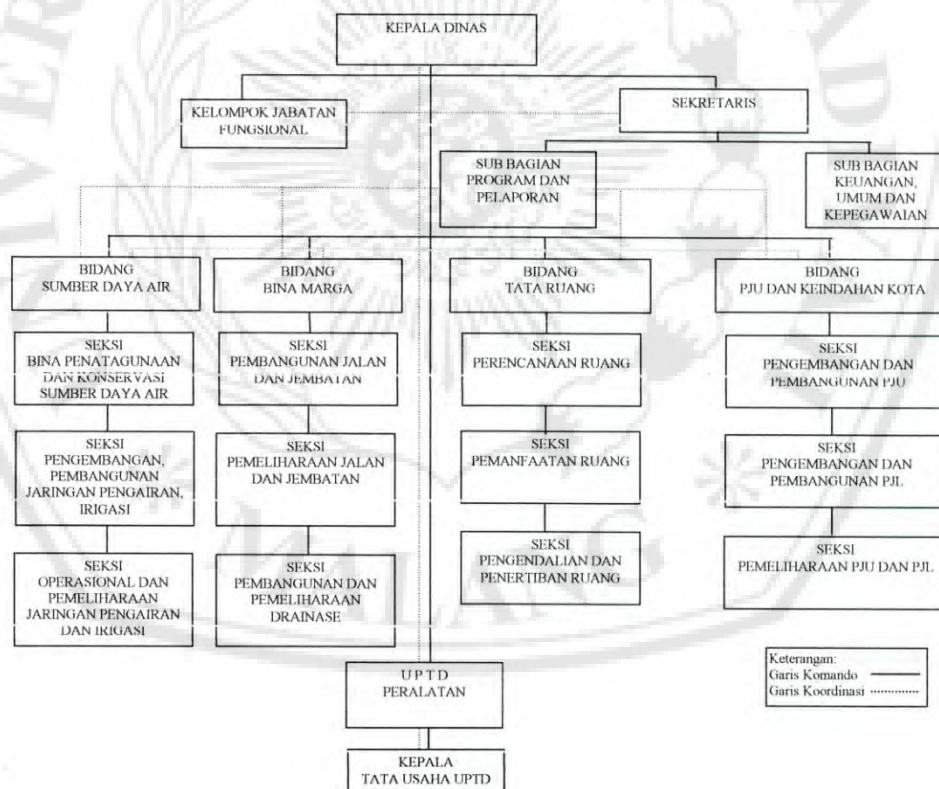
a) Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. Berdasarkan visi yang ditetapkan dijabarkan kedalam 6 (enam) misi antara lain sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan infrastruktur di bidang sumber daya air, termasuk mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan jaringan irigasi, mendukung ketersediaan air bersih, serta mengamankan pusat-pusat produksi dan permukiman dari bahaya daya rusak air;
2. Memenuhi kebutuhan infrastruktur di bidang jalan, jembatan, plengsengan dan drainase, dalam rangka mendukung pengembangan wilayah dan kelancaran distribusi barang dan jasa;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya energi dan pertambangan dalam rangka mendukung pemenuhan energi alternatif, serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan;

4. Meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur bidang sumber daya air, jaringan irigasi, jalan, jembatan, plengsengan dan drainase;
5. Mengembangkan teknologi yang tepat guna dan kompetitif serta meningkatkan keandalan mutu infrastruktur;
6. Menerapkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip good governance serta mengembangkan SDM yang profesional.

Gambar 3.5 Bagan Struktur Organisasi Dinas PU



Sumber: Renja Dinas PU Kota Batu Tahun 2017

Seperti halnya Dinas pertanian, Dinas PU juga merupakan dinas teknis, yang pada kebijakan LP2B memiliki peran dalam penyediaan basis data pada sistem irigasi sawah di Kota Batu, sehingga bersama dua instansi lainnya dinas PU berkoordinasi dalam penentuan LP2B di Kota Batu. Bidang yang turut serta dalam proses penetapan adalah Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Penataan Ruang.

